



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2023

Tabek Panjang, 04 Agustus 2022



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA



ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan salah satu dokumen dalam merencanakan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Yang digambarkan dalam Renja adalah mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renja, Evaluasi Renja Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah dokumen ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tabek Panjang, 04 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BILAL HANIF SST
NIP. 19720625 199202 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		Hal i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
 BAB I	 : PENDAHULUAN	 I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-2
1.4	Sistematika Penulisan	I-3
 BAB II	 : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	 II-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-7
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-10
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-10
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-14
 BAB III	 : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	 III-1
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-1
3.3	Program dan Kegiatan	III-2
 BAB IV	 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	 IV-1
 BAB V	 : PENUTUP	 V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-2
Tabel 2.2	: Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	II-8
Tabel 2.3	: Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	II-8
Tabel 2.4	: Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	II-9
Tabel 2.5	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	II-10
Tabel 2.6	: Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD	II-12
Tabel 2.7	: Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-15
Tabel 2.8	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-26
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-2
Tabel 3.2	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-3
Tabel 3.3	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pertanahan	III-7
Tabel 3.4	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dalam Renja tahun 2023	III-8
Tabel 4.1	: Rencana Target Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-1
Tabel 4.2	: Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2023	IV-1
Tabel 4.3	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap keempat dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan dalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan diraih oleh OPD dengan melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Terkait dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, saat ini telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja Dinas PUPR). Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- a. Unit kerja menyusun Renja awal berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil kunjungan lapangan dan usulan Kepala Daerah.
- b. Menampung usulan masyarakat dari hasil kegiatan Musrenbang dan menyaringnya untuk dimasukkan dalam Renja.
- c. Menyatukan Renja dari seluruh unit kerja menjadi Renja OPD berdasarkan pagu indikatif dan menyampaikannya ke Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bagian dari RKPD. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 final tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Renja yang disusun setiap tahun merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun untuk 5 tahun. Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 juga mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana DAK yang

sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. Renja Tahun 2023 ini akan dijadikan bahan dalam menetapkan KUA PPAS dan penyusunan RAPBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tata Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1).
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 52) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 76).

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 74).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah serta program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023.
- V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renstra tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	3	1								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2	1						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2	1	1					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)	9	6	2	100%	1	3	37,50%
1	3	1	2	1	6					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)	28	5	4	100%	4	8	33,33%
1	3	1	2	1	7					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP, LKPJ yang disusun (dokumen)	14	10	2	100%	2	4	33,33%
1	3	1	2	2						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2	2	1					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya (orang)	89	75	79	100%	81	81	91,01%
1	3	1	2	2	5					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun (dokumen)	7	1	1	100%	1	2	33,33%
1	3	1	2	2	8					
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	7	1	1	100%	1	2	33,33%
1	3	1	2	5						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2	5	1					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang telah mengikuti bintek dan pelatihan (orang)	92	5	18	27,78%	12	17	19,54%
1	3	1	2	6						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2	6	1					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)	30	17	12	100%	22	34	113,33%
1	3	1	2	6	2					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	313	89	35	68,57%	35	59	26,34%
1	3	1	2	6	4					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	68	73	62	100%	64	64	94,12%
1	3	1	2	6	5					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia	43500	4345	7000	85,71%	7100	13100	33,45%

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2020	Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
								(lembar)								
1	3	1	2	6	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)	4	4	12	4	33,33%	4	4	100%
1	3	1	2	6	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan (porshi)	35325	3100	5825	1880	32,74%	5850	7730	23,99%
1	3	1	2	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (OH)	278	11	287	287	100%	42	287	103,24%
1	3	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2	8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	9360	2000	3000	438	35.32%	1250	1688	22,94%
1	3	1	2	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayarkan (rekening)	288	36	48	48	100%	48	96	38,09%
1	3	1	2	8	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	52	28	45	32	71.11%	48	32	61,54%
1	3	1	2	8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tanaga kontrak yang dibayarkan gajinya (orang)	28	28	28	28	100%	28	28	100%
1	3	1	2	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	75%	60%	62%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2	9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)	68	57	57	57	100%	62	62	91,18%
1	3	1	2	9	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)	12	10	10	10	100%	10	10	100%
1	3	1	2	9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)	10	8	8	8	100%	8	8	80%
1	3	1	2	9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor (paket)	3	1	1	1	100%	2	2	66,66%
1	3	1	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	62,78%	54,79	55,81	55,73	99,86%	57,05	55,73	88,77%
1	3	1	0	2	1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	691,33	603,34 km	614,58	613,69	99,86%	628,23	613,69	88,77%
1	3	1	0	2	1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jalan/ jembatan yang tersusun (dokumen)	33	0	3	8	266,67%	5	13	39,39%
1	3	1	0	2	1	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi eksisting jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)	37	0	4	2	50,00%	6	8	21,62%
1	3	1	0	2	1	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)	107,57	0	18,67	11,6	62,13%	12,4	24	22,31%

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2020	Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	3	1	0	2	1	1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)	92,67	5	22,67	2,63	11,60%	10	12,63	13,63%
1	3	1	0	2	1	1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)	89,8	9	6,3	4	63,49%	14	18	20,04%
1	3	1	0	2	1	2	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	31	0	6	4	66,67%	4	8	25,81%
1	3	1	0	2	1	8	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi (unit)	55	1	5	4	80,00%	10	14	25,45%
1	3	1	0	2	1	2	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terbangunnya Jembatan terdampak Bencana (unit)	57	0	32	1	3,13%	25	26	45,61%
1	3	2					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	81,52	74,63	77,52	44,17	56,98%	78,32	44,17	54,18%
1	3	2	2	1			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara	84,62	76	79	44,17	55,91%	80,12	44,17	52,20%
1	3	2	2	1	3		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)	34	0	5	2	40%	3	5	14,71%
1	3	2	2	1	6		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)	41	10	2	1	50%	4	5	12,20%
1	3	2	2	1	4	6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)	145	50	11	28	255%	17	45	31,03%
1	3	2	2	2			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang terkelola	83,08	78	80	44,17	55,21%	80,6	44,17	53,17%
1	3	2	2	2	1		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)	42	6	4	8	200,00%	5	13	30,95%
1	3	2	2	2	8		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)	208	2	30	36	120,00%	26	62	29,81%
1	3	2	2	2	1	4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	175	13	25	25	100,00%	20	45	25,71%
1	3	2	2	2	2	1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	223	0	23	23	100,00%	40	63	28,25%
1	3	3					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	90,12	79,4	81,62	80,7	98,87%	80,05	80,7	89,55%
1	3	3	2	1			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih	61364	60.904	340	317	93,24%	58.926	317	0,52%

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
							Kabupaten/Kota									
1	3	3	2	1	4		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	51759	51.559	220	397	180,45%	200	597	1,15%
1	3	3	2	1	5		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	9605	9.345	120	0	0,00%	240	204	2,12%
1	3	5					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	86,85	76,45	78,45	76,65	97,71%	80,05	76,65	76,65
1	3	5	2	1			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	59541	58.641	58.781	58.672	99,81%	58.926	58.672	98,54%
1	3	5	2	1	1	2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	900	58.641	140	150	107,14%	145	295	32,78%
1	3	6					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	52	40	42	41,74	99,38%	44	41,74	80,27%
1	3	6	2	1			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)	7402	3.200	3.680	3200	86,96%	4.232	3200	43,23%
1	3	6	2	1	1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong yang tersusun (dokumen)	38	6	6	8	133,33%	5	13	40,63%
1	3	6	2	1	5		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)	38,75	6	5,15	6	116,50%	3	9	27,48%
1	3	6	2	1	6		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan (km)	6,51	0,6	0,71	0,7	98,59%	0,6	1,3	21,99%
1	3	8					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	85	65	68	66	97,06%	71	71	83,53%
1	3	8	2	1			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	46	10	12	2	16,67%	18	12	26,09%
1	3	8	2	1	1		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan	Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)	45	12	15	78	520,00%	3	81	180,00%

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
							Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG									
1	3	8	2	1	2		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	46	10	2	4	200,00%	6	10	27,77%
1	3	11					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100	0	95	75	78,95%	100	75	75,00%
1	3	11	2	1			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	416	0	90	42	46,67%	65	107	25,72%
1	3	11	2	1	4		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (orang)	260	0	60	30	50,00%	40	70	26,92%
1	3	11	2	1	6		Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)	156	0	30	42	140,00%	25	67	42,95%
1	3	11	2	1	7		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lembaga konstruksi yang terbina (Lembaga Konstruksi)	40	0	40	30	75,00%	35	30	75,00%
1	3	11	2	4			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	100	0	55	100	181,82%	60	55	55,00%
1	3	11	2	4	3		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (%)	60	0	50	50	100,00%	60	50	83,33%
1	3	12					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	90	60	65	70	107,69%	70	70	77,78%
1	3	12	2	1			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	6	0	1	0	0,00%	1	0	0
1	3	12	2	1	1		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dalam rangka penetapan rencana tata ruang (kali)	100	15	50	6	12,00%	20	26	26%
1	3	12	2	1	3		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan (peraturan)	6	0	1	0	0,00%	1	1	16,66%
1	3	12	2	1	4		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang (orang)	180	0	30	0	0,00%	30	30	16,66%
1	3	12	2	2			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan tata ruang yang telah ada (Dokumen)	14	0	1	0	0,00%	3		
1	3	12	2	2	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)	14	0	1	1	100,00%	2	3	21,42%
1	3	12	2	3			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)	135	25	10	39	390,00%	20	64	47,41%
1	3	1	2	3	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk	Jumlah Rekomendasi Investasi yang	56	25	5	1	20,00%	6	26	46,43%

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n - 3) /2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n - 2) / 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n - 1) / 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		2				Investasi dan Pembangunan Daerah	diterbitkan (rekomendasi)								
1	3	1 2	2	4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)	45	25	10	39	390,00%	2	39	86,67%
1	3	1 2	2	4	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pengendalian ruang yang terlaksana (kali)	32	25	2	10	500,00%	1	2	28,57%
2	1 0	4				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gaapan (%)	100	100	100	100	100,00%	100	100	100
2	1 0	4	2	1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi	23	5	3	0	0,00%	3	0	0
2	1 0	4	2	1	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi (kasus)	19	5	3	0	0,00%	2	0	0
2	1 0	9				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin pengelolaan membuka tanah yang difasilitasi (%)	80	0	30	0	0,00%	40	0	0,00%
2	1 0	9	2	1		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Luas izin membuka tanah	44	0	20	0	0,00%	20	0	0
2	1 0	9	2	1	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah pengendalian pemanfaatan tanah negara yang terlaksana yang difasilitasi (kali)	80	0	30	0	0,00%	40	0	0
2	1 0	1 0				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	100	0	20	0	0,00%	20	0	0%
2	1 0	1 0	2	1		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi	8	0	2	0	0,00%	2	0	0
2	1 0	1 0	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian perencanaan penggunaan tanah (kali)	5	0	1	2	200,00%	1	3	60%

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2021), dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Penyebab tidak memenuhi target kinerja	Tindakan yang harus dilakukan
1	2	3	4
1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan di masa yang akan datang
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu dianggarkan kembali di masa yang akan datang
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Pelaksanaan Sub Kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
8	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran di masa yang akan datang
9	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tidak adanya anggaran belanja modal untuk peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran di masa yang akan datang
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Kurangnya alokasi anggaran sementara jalan yang perlu ditingkatkan/diperbaiki masih panjang	Perlu diprioritaskan anggaran di masa yang akan datang
11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
12	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
13	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
14	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran banyak berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
15	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
16	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan
17	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Anggaran berkurang karena Refocusing Anggaran	Perlu diprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan

Tabel 2.3
Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja	Penyebab Telah Memenuhi Target Kinerja
1	2	3
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja	Penyebab Telah Memenuhi Target Kinerja
1	2	3
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
9	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
10	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
11	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
12	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
13	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
14	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
15	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja
16	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai Renja

Tabel 2.4
Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Penyebab Melebihi Target Kinerja
1	2	3
1	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
2	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Ada tambahan paket perencanaan di APBD Perubahan
3	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
4	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
5	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Ada tambahan paket perencanaan di APBD Perubahan
6	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Ada tambahan paket kegiatan di APBD Perubahan
8	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Karena antusiasnya masyarakat untuk memiliki Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM / standar nasional (%)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	100	90,12	81,62	83,12	84,72	86,42	80,70	82,12	84,72	86,42	Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara nasional
2	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	100	86,85	78,45	80,05	81,65	83,35	76,65	79,05	81,65	83,35	Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara nasional
3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		62,78	55,81	57,05	58,65	59,95	55,73	57,05	58,65	59,95	Proyeksi Capaian telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
4	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		81,52	77,52	78,32	79,12	79,92	82,89	83,02	83,55	84	Proyeksi Capaian disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
5	Persentase ketaatan terhadap RTRW		90	65	70	75	80	70	72	75	80	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
6	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)		85	68	71	75	77	65	68	71	75	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
7	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)		75	50	55	60	65	50	50	55	60	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
8	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)		52	42	44	46	48	42	44	46	48	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
9	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)		100	95	100	100	100	95	97	100	100	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
10	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)		50	0	5	20	30	0	0	5	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
11	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)		50	0	10	20	30	0	0	10	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran

No	Indikator	SPM / standar nasional (%)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
12	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)		4	0	2	2	3	0	2	2	3	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
13	Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah (%)		2	0	2	2	2	0	2	2	2	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
14	Persentase fasilitas penyelesaian sengketa tanah garapan (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
15	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)		0	0	30	25	25	0	0	25	25	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
16	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)		20	0	20	20	20	0	20	20	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
17	Persentase fasilitas penetapan Tanah Ulayat (%)		20	0	20	20	20	0	20	20	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
18	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)		20	0	20	20	20	0	20	20	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
19	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)		80	30	40	50	60	0	30	40	50	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
20	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)		20	20	20	20	20	10	20	20	20	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		80,5	78,05	78,50	78,92	79,45	77,64	78,50	78,92	79,45	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
22	Indeks Reformasi Birokrasi		34,54	24,14	26,14	28,24	30,34	24,14	26,14	28,24	30,34	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		0,842	0,742	0,762	0,782	0,802	0,742	0,762	0,782	0,802	Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD

No	Sasaran	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Pencapaian						Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan irigasi	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	60	61.52	41.5	44.61	46.69	48.22	49.8	52.5	41.5	44.61	46,24	48.22	54.79	55,73	Capaian tahun sampai tahun 2021 masih jauh dibawah target nasional, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
		Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik (%)	70	85	59.22	71.75	80.09	81.7	83.33	85	59.23	71.75	63,10	60.99	74.64	44,167	Capaian tahun sampai tahun 2021 masih dibawah target Renstra, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
2	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	100	81.62	73	75	76.35	77.33	79.42	81.62	74.02	75	75,03	79.17	79.40	80,70	Capaian tahun sampai tahun 2021 masih dibawah target SPM secara nasional, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	100	74.75	70	72	73,73	73.95	74.25	74.75	71,88	72,47	73,73	73.95	76.45	76,65	Capaian tahun sampai tahun 2021 masih dibawah target SPM secara nasional, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
4	Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100	46.15	35	40	45	50	55	60	35	40	45	50	60	70	Capaian tahun sampai tahun 2021 masih jauh dibawah target nasional, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	100	50	52	57	62	67	72	50	52	57	62	80.18	77,64	Capaian tahun sampai tahun 2021 masih jauh dibawah target nasional, perlu prioritas anggaran di tahun akan datang untuk mencapainya

Dari tabel ini terlihat bahwa Target Renja yang disusun telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran, namun sebagian besar masih jauh dibawah target SPM secara nasional. Sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran, peningkatan kinerja dan alokasi waktu untuk bisa mencapai target sesuai standar nasional.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD sudah baik namun karena keterbatasan anggaran maka masih banyak kebutuhan dan usulan masyarakat yang belum terpenuhi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD :
 - Harga Penawaran dari Penyedia Konstruksi untuk pekerjaan yang dilelang sangat rendah, sehingga bisa berdampak pada kualitas pekerjaan konstruksi.
 - Keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan monitoring kegiatan ke lapangan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
 - Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik, akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
 - Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik juga ikut menyukseskan tercapainya program nasional di bidang infrastruktur.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

 - Keterbatasan jumlah personil
 - Keterbatasan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang baik.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya :

 - Masyarakat mempunyai harapan yang besar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan siap mendukung program yang dilaksanakan.
 - Tersedia peluang meraih dana dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
 - a. Adanya prioritas usulan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat
 - b. Adanya prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta program nasional

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Riview Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Terdapat tambahan target capaian kinerja dan pagu indikatif pada beberapa program dari rancangan awal RKPD karena setelah dievaluasi pada rancangan awal ada perubahan untuk memenuhi kebutuhan terkini. Adapun program tersebut adalah:

- a. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 - b. Penyelenggaraan penataan ruang
2. Belum semua kebutuhan masyarakat tertampung dalam RKPD Awal karena keterbatasan anggaran.

Riview terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
	1		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Kab. Lima Puluh Kota	79,12	54.538.000.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Kab. Lima Puluh Kota	79,12	54.538.000.000	
		1.1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara	Kab. Lima Puluh Kota	81,25	8.800.000.000	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara	Kab. Lima Puluh Kota	81,25	8.800.000.000	
		1.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	5	600.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	5	600.000.000	
		1.1.2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)	Kab. Lima Puluh Kota	5	2.200.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)	Kab. Lima Puluh Kota	5	2.200.000.000	
		1.1.3	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)	Kab. Lima Puluh Kota	18	6.000.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)	Kab. Lima Puluh Kota	18	6.000.000.000	
		1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)	Kab. Lima Puluh Kota	81,22	45.738.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)	Kab. Lima Puluh Kota	81,22	45.738.000.000	
		1.2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	6	750.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	6	750.000.000	
		1.2.2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)	Kab. Lima Puluh Kota	36	11.788.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)	Kab. Lima Puluh Kota	36	11.788.000.000	
		1.2.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	Kab. Lima Puluh Kota	27	31.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	Kab. Lima Puluh Kota	27	31.000.000.000	
		1.2.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	Kab. Lima Puluh Kota	40	2.200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	Kab. Lima Puluh Kota	40	2.200.000.000	
	2		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	Kab. Lima Puluh Kota	84,72	9.270.000.000	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	Kab. Lima Puluh Kota	84,72	9.270.000.000	
		2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	450	9.270.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	450	9.270.000.000	
		2.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air	Kab. Lima Puluh Kota	200	4.000.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air	Kab. Lima Puluh Kota	200	4.000.000.000	

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				bersih (rumah)					bersih (rumah)				
		2.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	250	5.270.000.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	250	5.270.000.000	
	3		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	60	5.501.600.000	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Kab. Lima Puluh Kota	60	5.501.600.000	
		3.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	Kab. Lima Puluh Kota	230	5.501.600.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	Kab. Lima Puluh Kota	230	5.501.600.000	
		3.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	1	5.000.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	1	5.000.000.000	
		3.1.2	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	3	501.600.000	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	3	501.600.000	
	4		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Kab. Lima Puluh Kota	81,65	11.072.000.000	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Kab. Lima Puluh Kota	81,65	11.072.000.000	
		4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	59,076	11.072.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	59,076	11.072.000.000	
		4.1.1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	150	11.072.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Kab. Lima Puluh Kota	150	11.072.000.000	
	5		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	Kab. Lima Puluh Kota	46	5.262.400.000	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	Kab. Lima Puluh Kota	46	5.262.400.000	
		5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)	Kab. Lima Puluh Kota	4866,8	5.262.400.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)	Kab. Lima Puluh Kota	4866,8	5.262.400.000	
		5.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang tersusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	4	500.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang tersusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	4	500.000.000	
		5.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)	Kab. Lima Puluh Kota	6	3.412.400.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)	Kab. Lima Puluh Kota	6	3.412.400.000	
		5.1.3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan (km)	Kab. Lima Puluh Kota	1	1.000.000.000	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan (km)	Kab. Lima Puluh Kota	1	1.000.000.000	
		5.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang terpelihara (km)	Kab. Lima Puluh Kota	2	350.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang terpelihara (km)	Kab. Lima Puluh Kota	2	350.000.000	
	6		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	Kab. Lima Puluh Kota	20	1.855.130.000	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	Kab. Lima Puluh Kota	20	1.855.130.000	
		6.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi infrastrukturnya	Kab. Lima Puluh Kota	19	1.855.130.000	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi infrastrukturnya	Kab. Lima Puluh Kota	19	1.855.130.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
6.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibangun dan dikembangkan (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	5	1.185.130.000	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibangun dan dikembangkan (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	5	1.185.130.000	
6.1.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	5	300.000.000	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	5	300.000.000	
6.1.3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diawasi dan dikendalikan (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	4	200.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang diawasi dan dikendalikan (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	4	200.000.000	
6.1.4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibina (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	5	170.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah yang dibina (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	5	170.000.000	
7	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Kab. Lima Puluh Kota	75	31.744.000.000	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Kab. Lima Puluh Kota	75	31.744.000.000	
7.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	25	31.744.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	25	31.744.000.000	
7.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	344.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	344.000.000	
7.1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	7	31.400.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	7	31.400.000.000	
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	Kab. Lima Puluh Kota	60	1.610.610.000	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	Kab. Lima Puluh Kota	60	1.610.610.000	
8.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata	Kab. Lima Puluh Kota	6	1.610.610.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata	Kab. Lima Puluh Kota	6	1.610.610.000	
8.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	120.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan yang disusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	120.000.000	
8.1.2	Supervisi	Jumlah Supervisi	Kab. Lima	1	100.000.000	Supervisi	Jumlah Supervisi	Kab. Lima	1	100.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Puluh Kota			Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Puluh Kota			
	8.1.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota	3	580.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota	3	580.000.000	
	8.1.5	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota	2	610.610.000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota	2	610.610.000	
	8.1.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota	30	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Masyarakat dibina dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	30	100.000.000	
	8.1.7	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota	55	100.000.000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang termonitoring penataan/ pemeliharaannya (%)	Kab. Lima Puluh Kota	55	100.000.000	
9		Program Penyelenggaraan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota	58,65	159.379.000.000	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Lima Puluh Kota	58,65	159.379.000.000	
	9.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	645,85	159.379.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	Kab. Lima Puluh Kota	645,85	159.379.000.000	
	9.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Lima Puluh Kota	5	875.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/pemeliharaan jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	5	875.000.000	
	9.1.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota	15.000	37.500.000.000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan (m2)	Kab. Lima Puluh Kota	15.000	37.500.000.000	
	9.1.3	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Lima Puluh Kota	4	2.000.000.000	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya leger jalan (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	4	2.000.000.000	
	9.1.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Lima Puluh Kota	6	700.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi eksisting jalan/jembatan yang tersusun (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	6	700.000.000	
	9.1.5	Pembangunan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota	5,6	11.304.000.000	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (km)	Kab. Lima Puluh Kota	5,6	11.304.000.000	
	9.1.6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Lima Puluh Kota	7	7.000.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan sesuai standar (km)	Kab. Lima Puluh Kota	7	7.000.000.000	
	9.1.7	Rekonstruksi Jalan	Kab. Lima Puluh Kota	13,5	29.000.000.000	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)	Kab. Lima Puluh Kota	13,5	29.000.000.000	
	9.1.8	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Lima Puluh Kota	13	36.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)	Kab. Lima Puluh Kota	13	36.000.000.000	
	9.1.9	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Lima Puluh Kota	16,5	5.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)	Kab. Lima Puluh Kota	16,5	5.000.000.000	
	9.1.10	Pembangunan Jembatan	Kab. Lima Puluh Kota	6	26.500.000.000	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	6	26.500.000.000	
	9.1.11	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Lima Puluh Kota	12	3.500.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi (Unit)	Kab. Lima Puluh Kota	12	3.500.000.000	
10		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Lima Puluh Kota	100	1.342.550.000	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	1.342.550.000	
	10.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Lima Puluh Kota	65	460.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)	Kab. Lima Puluh Kota	65	460.000.000	
	10.1.1	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan	Kab. Lima Puluh Kota	2	80.000.000	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah SOP Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga	Kab. Lima Puluh Kota	2	80.000.000	

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tenaga Terampil Konstruksi	Terampil Konstruksi yang ditetapkan (SOP)				Tenaga Terampil Konstruksi	Terampil Konstruksi yang ditetapkan (SOP)				
		10.1.2	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	40	100.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	40	100.000.000	
		10.1.3	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat))	Kab. Lima Puluh Kota	25	100.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat))	Kab. Lima Puluh Kota	25	100.000.000	
		10.1.4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lembaga konstruksi yang terbina (lembaga konstruksi)	Kab. Lima Puluh Kota	35	100.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lembaga konstruksi yang terbina (lembaga konstruksi)	Kab. Lima Puluh Kota	35	100.000.000	
		10.1.5	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Termonevnya Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	80.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Termonevnya Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	80.000.000	
		10.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	390.310.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	390.310.000	
		10.2.1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	75.000.000	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	75.000.000	
		10.2.2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya SK Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	75.000.000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya SK Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	75.000.000	
		10.2.3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah peserta Pelatihan Administrator SIPJAKI di Kabupaten Lima Puluh Kota (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	20	60.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah peserta Pelatihan Administrator SIPJAKI di Kabupaten Lima Puluh Kota (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	20	60.000.000	
		10.2.4	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	90.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	90.000.000	
		10.2.5	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	90.310.000	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1	90.310.000	
		10.3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan	Kab. Lima Puluh Kota	28	272.240.000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan	Kab. Lima Puluh Kota	28	272.240.000	
		10.3.1	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan	Kab. Lima Puluh Kota	28	97.240.000	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan	Kab. Lima Puluh Kota	28	97.240.000	
		10.3.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang meningkat kapasitasnya	Kab. Lima Puluh Kota	42	75.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang meningkat kapasitasnya	Kab. Lima Puluh Kota	42	75.000.000	
		10.3.3	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Persentase Termonevnya IUJK yang telah diterbitkan (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	100.000.000	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Persentase Termonevnya IUJK yang telah diterbitkan (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	100.000.000	
		10.4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%)	Kab. Lima Puluh Kota	70	220.000.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi (%)	Kab. Lima Puluh Kota	70	220.000.000	
		10.4.1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penvelenggaraan, dan Tertib	Jumlah SOP Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Kab. Lima Puluh Kota	2	50.000.000	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Jumlah SOP Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Kab. Lima Puluh Kota	2	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Konstruksi yang ditetapkan				Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Konstruksi yang ditetapkan				
10.4.2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Lima Puluh Kota	20	80.000.000	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Lima Puluh Kota	20	80.000.000	
10.4.3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Lima Puluh Kota	60	90.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Lima Puluh Kota	60	90.000.000	
11	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	Kab. Lima Puluh Kota	75	1.260.000.000	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	Kab. Lima Puluh Kota	75	1.260.000.000	
11.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	410.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	410.000.000	
11.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kemajuan proses Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	130.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kemajuan proses Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (%)	Kab. Lima Puluh Kota	100	130.000.000	
11.1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RRTR)	Kab. Lima Puluh Kota	1	100.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RRTR)	Kab. Lima Puluh Kota	1	100.000.000	
11.1.3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan (peraturan)	Kab. Lima Puluh Kota	1	60.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan (peraturan)	Kab. Lima Puluh Kota	1	60.000.000	
11.1.4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	30	120.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	30	120.000.000	
11.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	6	560.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	6	560.000.000	
11.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	560.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	560.000.000	
11.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	20	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	20	200.000.000	
11.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Investasi yang diterbitkan (rekomendasi)	Kab. Lima Puluh Kota	5	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Investasi yang diterbitkan (rekomendasi)	Kab. Lima Puluh Kota	5	200.000.000	
11.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	2	90.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	2	90.000.000	
11.4.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan penataan ruang yang terlaksana (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	1	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan penataan ruang yang terlaksana (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	1	90.000.000	
II	Urusan Pemerintahan					Urusan Pemerintahan					

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bidang Pertanahan					Bidang Pertanahan					
1			Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi	Kab. Lima Puluh Kota	100	138.200.000	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi	Kab. Lima Puluh Kota	100	138.200.000	
		1.1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi yang direkomendasikan	Kab. Lima Puluh Kota	2	138.200.000	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi yang direkomendasikan	Kab. Lima Puluh Kota	2	138.200.000	
		1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Permohonan Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha yang difasilitasi (permohonan)	Kab. Lima Puluh Kota	2	138.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Permohonan Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha yang difasilitasi (permohonan)	Kab. Lima Puluh Kota	2	138.200.000	
2			Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pesentase Fasilitas Pengadaan Tanah	Kab. Lima Puluh Kota	100	531.560.000	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pesentase Fasilitas Pengadaan Tanah	Kab. Lima Puluh Kota	100	531.560.000	
		2.1	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Tanah (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	531.560.000	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Tanah (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	531.560.000	
		2.1.1	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Terlaksananya Fasilitas Pengadaan Tanah (Kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	531.560.000	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Terlaksananya Fasilitas Pengadaan Tanah (Kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	531.560.000	
		3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitas penyelesaian sengketa tanah garapan	Kab. Lima Puluh Kota	100	148.840.000	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitas penyelesaian sengketa tanah garapan	Kab. Lima Puluh Kota	100	148.840.000	
		3.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi (kasus)	Kab. Lima Puluh Kota	3	148.840.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi (kasus)	Kab. Lima Puluh Kota	3	148.840.000	
		3.1.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi (kasus)	Kab. Lima Puluh Kota	2	68.840.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi (kasus)	Kab. Lima Puluh Kota	2	68.840.000	
		3.1.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	Kab. Lima Puluh Kota	2	80.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	Kab. Lima Puluh Kota	2	80.000.000	
		4	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kab. Lima Puluh Kota	25	309.000.000	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kab. Lima Puluh Kota	25	309.000.000	
		4.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	309.000.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	309.000.000	
		4.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah yang difasilitasi (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	5	159.000.000	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah yang difasilitasi (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	5	159.000.000	
		4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (kasus)	Kab. Lima Puluh Kota	2	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (kasus)	Kab. Lima Puluh Kota	2	150.000.000	
		5	Program Redistribusi Tanah,	Persentase Redistribusi	Kab. Lima	20	552.820.000	Program Redistribusi Tanah,	Persentase Redistribusi	Kab. Lima	20	552.820.000	

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	Puluh Kota			Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan	Puluh Kota			
		5.1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	402.820.000	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	402.820.000	
		5.1.1	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	100.000.000	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	100.000.000	
		5.1.2	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	150.000.000	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	150.000.000	
		5.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria yang terlaksana	Kab. Lima Puluh Kota	2	100.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria yang terlaksana	Kab. Lima Puluh Kota	2	100.000.000	
		5.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	Kab. Lima Puluh Kota	2	52.820.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	Kab. Lima Puluh Kota	2	52.820.000	
		5.2	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	150.000.000	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	2	150.000.000	
		5.2.1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang difasilitasi (pemilik)	Kab. Lima Puluh Kota	2	100.000.000	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang difasilitasi (pemilik)	Kab. Lima Puluh Kota	2	100.000.000	
		5.2.2	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Kab. Lima Puluh Kota	2	50.000.000	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Kab. Lima Puluh Kota	2	50.000.000	
	6		Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat	Kab. Lima Puluh Kota	20	196.680.000	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat	Kab. Lima Puluh Kota	20	196.680.000	
		6.1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	5	196.680.000	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	5	196.680.000	
		6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Batas Tanah Ulayat yang dipetakan	Kab. Lima Puluh Kota	2	76.680.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Batas Tanah Ulayat yang dipetakan	Kab. Lima Puluh Kota	2	76.680.000	
		6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah tanah ulayat yang telah	Kab. Lima	2	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah tanah ulayat yang telah	Kab. Lima	2		

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	diakui dan dikukuhkan Masyarakat Hukum Adat	Puluh Kota			Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	diakui dan dikukuhkan Masyarakat Hukum Adat	Puluh Kota		60.000.000	
		6.1.3	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Ulayat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	2	60.000.000	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Ulayat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota	2	60.000.000	
	7		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola	Kab. Lima Puluh Kota	20	239.200.000	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola	Kab. Lima Puluh Kota	20	239.200.000	
		7.1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	Kab. Lima Puluh Kota	2	89.200.000	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	Kab. Lima Puluh Kota	2	89.200.000	
		7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Masalah Tanah Kosong yang yang diselesaikan	Kab. Lima Puluh Kota	2	89.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Masalah Tanah Kosong yang yang diselesaikan	Kab. Lima Puluh Kota	2	89.200.000	
		7.2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah dimanfaatkan	Kab. Lima Puluh Kota	2	150.000.000	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah dimanfaatkan	Kab. Lima Puluh Kota	2	150.000.000	
		7.2.1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang telah didata (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	75.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang telah didata (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	75.000.000	
		7.2.2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang dimanfaatkan (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	75.000.000	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang dimanfaatkan (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	75.000.000	
	8		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	50	201.990.000	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota	50	201.990.000	
		8.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase izin yang diterbitkan	Kab. Lima Puluh Kota	20	201.990.000	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase izin yang diterbitkan	Kab. Lima Puluh Kota	20	201.990.000	
		8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pemberian Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	Kab. Lima Puluh Kota	10	101.990.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pemberian Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	Kab. Lima Puluh Kota	10	101.990.000	
		8.1.2	Pengendalian pemanfaatan tanah negara	Persentase pemanfaatan tanah negara yang sesuai peruntukan (%)	Kab. Lima Puluh Kota	50	100.000.000	Pengendalian pemanfaatan tanah negara	Persentase pemanfaatan tanah negara yang sesuai peruntukan (%)	Kab. Lima Puluh Kota	50	100.000.000	
	9		Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	20	213.710.000	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	20	213.710.000	
		9.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	213.710.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	2	213.710.000	
		9.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah perencanaan penggunaan tanah yang dibuat (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	93.710.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah perencanaan penggunaan tanah yang dibuat (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	93.710.000	
		9.1.2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Zona Nilai Tanah yang dibuat (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	60.000.000	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Zona Nilai Tanah yang dibuat (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	60.000.000	
		9.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Kabupaten yang telah dikonsolidasi (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	1	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Kabupaten yang telah dikonsolidasi (kapling)	Kab. Lima Puluh Kota	1	60.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam setiap Musrenbang, banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu memilih dan memprioritaskan usulan yang diterima dan dimasukkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selain melalui Musrenbang, usulan dari masyarakat juga disampaikan secara langsung ke OPD baik melalui surat ataupun lisan, di lain waktu disela-sela pertemuan tetap juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima usulan dari masyarakat, sebagai bukti bahwa masyarakat memiliki harapan yang sangat besar kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya, karena luasnya wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak diketahui secara detail kondisi seluruh infrastruktur yang ada.

Aspirasi masyarakat ini sekaligus juga menjadi solusi untuk menyelesaikan isu-isu penting dan penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2023 melalui aplikasi SIPD, aparaturnagari dan Kecamatan sudah mengusulkan dan menginput usulan kegiatan tahun 2023 yang berasal dari hasil musrenbang nagari dan kecamatan. Begitupun usulan kegiatan tahun 2023 yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga sudah diinput langsung oleh aparaturnagari di Sekretariat DPRD.

Usulan program dan kegiatan tahun 2023 yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran / Volume		Catatan Penting
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (unit)	Tersebar di Kab. Lima puluh Kota	23	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang terbangun (KM)	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	124	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran / Volume		Catatan Penting
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan pedesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	25	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	117	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung dan penampungan air lainnya yang terpelihara	aia songsang taeh bukik	10	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	43	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	6	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	233	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan sesuai standar	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	6	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	37	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	69	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	57	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	7	usulan	Diterima jika sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dan kewenangan OPD

Berdasarkan penelaahan oleh Tim Verifikasi terhadap usulan yang diinput tersebut, disampaikan sebagai berikut:

1. Usulan yang menjadi prioritas daerah dan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diterima dan disesuaikan dengan pagu indikatif. Diantaranya:
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan kabupaten
 - b. Pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
 - c. Pembangunan jaringan air bersih / air minum
 - d. Pembangunan drainase
 - e. Pembangunan infrastruktur pemerintah
 - f. Pembangunan jaringan irigasi
 - g. Pemeliharaan jaringan irigasi
 - h. Pembangunan embung
 - i. Pengamanan sungai
 - j. Pembangunan sarana air limbah
2. Usulan kegiatan yang pada tahun 2023 yang bukan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau kegiatan yang dialihkan kewenangannya pada pemerintah nagari, belum dapat diakomodir dalam Renja tahun 2023. Diantaranya :
 - a. Pembangunan Tangki Septik Individual

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, maka kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Adapun Prioritas untuk Penyusunan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada Permendagri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini telah mampu memenuhi target nasional tersebut, yaitu dengan menetapkan Perda No. 10 tahun 2011 tentang RPJPD tahun 2005-2025 dan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD juga menjadi prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2023, “Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan salahsatunya kearah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital dan infrastruktur konektivitas. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2023 tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan pariwisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Penyelesaian penyusunan Rencana Kerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan.
2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan seluruh urusan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan melalui sosialisasi dan atau bimbingan teknis.
3. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra dan Renja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prioritas pada kegiatan untuk peningkatan infrastruktur.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Lima Puluh Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta sasaran target kinerja Renstra adalah :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1. Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung 2. Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2	Meningkatkan Kualitas Jalan	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan 2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 4. Meningkatnya Pengembangan Permukiman
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi 3. Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 4. Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 5. Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 mengacu kepada tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum yang akan dicapai pada tahun 2023. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut kemudian dirumuskan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program, kegiatan dan subkegiatan untuk tahun 2023 tidak terlepas dari program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026.

Terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 urusan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Urusan Pertanahan

Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Alat Besar
			Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
			Normalisasi/Restorasi Sungai
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
6	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
7	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
8	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			dan Lingkungan
9	PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
			Pengelolaan Leger Jalan
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan
			Pembangunan Jalan
			Pelebaran Jalan Menuju Standar
			Rekonstruksi Jalan
			Pemeliharaan Berkala Jalan
			Pemeliharaan Rutin Jalan
			Penggantian Jembatan
			Rehabilitasi Jembatan
10	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
			Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
11	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Pertanahan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 13 program, 25 kegiatan dan 81 Sub Kegiatan dengan Total pagu indikatif sebesar Rp. 171.747.227.150,-

Rekap jumlah program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dalam Renja tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	23	79
2	Pertanahan	2	2	2
	TOTAL	16	25	81

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana Kerja dan Pendanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Target Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	Indikator	Target 2023	Ket
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan irigasi	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	58,65	
		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	84,55	
2	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	84,72	
		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	81,65	
3	Meningkatnya penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	75	
4	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78,92	

Dari table di atas Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 4 sasaran dengan 6 indikator, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan irigasi.

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan irigasi diukur dengan 2 indikator yaitu persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan target kinerja 2023 adalah 58,65% dan persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik dengan target kinerja 2023 adalah 84,55%.

2. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi diukur dengan 2 indikator yaitu Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum dengan target kinerja tahun 2023 adalah 84,72% dan Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak dengan kinerja tahun 2023 adalah 81,65%.

3. Meningkatkan penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW

Peningkatan penataan ruang kawasan yang sesuai RTRW diukur dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW yang target tahun 2023 adalah 75%.

4. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Peningkatan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel diukur dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota yang target kinerja tahun 2023 adalah 78,92.

Secara umum ada 23 indikator target rencana kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun rencana target kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Ket
1	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	%	75	

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Ket
2	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	%	60	
3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	58,65	
4	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	%	46	
5	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	%	100	
6	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	%	84,72	
7	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	%	81,65	
8	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	%	20	
9	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	%	20	
10	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	%	79,12	
5	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	75	
12	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)	%	2	
13	Persentase Fasilitas Pengadaan Tanah (%)	%	2	
14	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	%	100	
15	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	%	25	
16	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	%	20	
17	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	%	20	
18	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	%	20	
19	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	%	50	
20	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	%	20	
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks	78,92	
22	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	28,24	
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0,782	

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									171,578,406,600			351,640,964,270			
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									13,947,227,580			13,468,284,270			
1	3	1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									200,000,000			283,000,000			
1	0 3	0 1	2. 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	30,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50,000,000		
1	0 3	0 1	2. 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	15,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36,000,000		
1	0 3	0 1	2. 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	15,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,000,000		
1	0 3	0 1	2. 0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	35,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	45,000,000		
1	0 3	0 1	2. 0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	30,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tan Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targe t	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	1 Laporan 4 Dokumen	78.92 Poin	45,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50,000,000
1	0	0	2.	0													
3	3	1	0	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LKJIP, LKPI yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	2 Dokumen 1 Laporan	78.92 Poin	30,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,000,000
1	3	1	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,344,045,180				8,389,884,270
1	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	105 Orang 105 Orang/b	78.92 Poin	7,309,045,180	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8,334,884,270
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	1 Dokumen 1 Laporan	78.92 Poin	15,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20,000,000
3	3	1	0	5													
1	0	0	2.	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	20,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	35,000,000
1	3	1	2.	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								275,000,000				175,000,000
3	3	1	0	5													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tan Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targe t	
1	0	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	200 Paket	78.92 Poin	200,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
1	0	0	2.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	15 Orang	78.92 Poin	75,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	175,000,000
1	3	1	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah								460,954,000				942,000,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	15 Jenis 15 Paket	78.92 Poin	10,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,000,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	10 Paket 10 Unit	78.92 Poin	124,517,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	155,000,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	78 Jenis 100 Paket	78.92 Poin	96,600,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	147,000,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang cetak yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	50000 Lemba 11 Paket	r 78.92 Poin	50,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120,000,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbu h, Koto Baru Simalanggan g	100 %	4 Jenis 3 Dokumen	78.92 Poin	25,500,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
1	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggng	100 %	20 Laporan 5875 Porsi	78.92 Poin	40,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	80,000,000
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggng	100 %	22 Laporan 44 OH	78.92 Poin	114,337,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	370,000,000
1	3	1	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2,342,923,400				119,000,000		
1	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggng	100 %	4 Unit 4 Unit	78.92 Poin	488,971,400	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	64,000,000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang tersedia Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggng	100 %	1 Unit 1 Unit	78.92 Poin	1,781,852,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
1	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah mebel yang tersedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggng	100 %	28 Unit 14 Unit	78.92 Poin	72,100,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	55,000,000
1	3	1	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,896,400,000				879,400,000		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggng	100 %	1 Laporan 1260 Lembar	78.92 Poin	10,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	14,400,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telpon dan listrik yang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggng	100 %	1 Laporan 48 Rekening	78.92 Poin	120,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	130,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targe t	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Laporan 48 Unit	78.92 Poin	30,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	65,000,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan gajinya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Laporan 43 Orang	78.92 Poin	1,736,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	670,000,000
1	3	1	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,427,905,000				2,680,000,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	30 Unit 30 Unit	78.92 Poin	207,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	360,000,000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat berat yang terpelihara Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	11 Unit 11 Unit	78.92 Poin	482,026,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,400,000,000
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	9 Unit 9 Unit	78.92 Poin	217,973,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	640,000,000
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	3 Unit 3 Paket	78.92 Poin	520,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	280,000,000
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								26,000,000,000				58,809,000,000
1	3	2	2.	0	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								8,800,000,000				12,085,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
1	0	0	2.	0	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	5 Dokumen 10 Dokumen	79.12 %	600,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	750,000,000
1	0	0	2.	0	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	4 Unit 5 Embung	79.12 %	950,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	2,500,000,000
1	0	0	2.	4	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	18 Kawasan 0.5 KM	79.12 %	7,250,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	6,200,000,000
1	3	2	2.	0	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								17,200,000,000			46,724,000,000		
1	0	0	2.	0	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	6 Dokumen 16 Dokumen	79.12 %	750,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	850,000,000
1	0	0	2.	0	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	36 Jaringan Irigasi	79.12 %	7,706,408,800	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	9,974,000,000
1	0	0	2.	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	27 Jaringan Irigasi 9.381 KM	79.12 %	6,543,591,200	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	33,500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
1	0	0	2.	2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	40 Jaringan Irigasi 0.917 KM	79.12 %	2,200,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	2,400,000,000
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								12,877,898,100				9,548,000,000	
1	3	3	2.	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								12,877,898,100				9,548,000,000	
1	0	0	2.	0	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih			84,72 %	200 SR 200 Rumah		6,367,665,100			Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	84,72 %	4,100,000,000
1	0	0	2.	0	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih			84,72 %	250 Rumah		6,510,233,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	84,72 %	5,448,000,000
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								1,451,800,500				200,000,000	
1	3	4	2.	0	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								1,451,800,500				200,000,000	
1	0	0	2.	0	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			60 %	2000 Rumah Tangga 1 Unit		1,451,800,500	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	60 %	0
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								5,190,259,100				16,404,000,000	
1	3	5	2.	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								5,190,259,100				16,404,000,000	
1	0	0	2.	1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak			81,65 %	200 Rumah Tangga 150 Rumah		3,026,796,100	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	81,65 %	11,404,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targe t	
1	0	0	2.	1	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Luas lahan untuk IPLT		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,65 %	20000 M2		2,163,463,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	81,65 %	5,000,000,000
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								3,070,817,500				5,833,300,000
1	3	6	2. 0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								3,070,817,500				5,833,300,000
1	0	0	2.	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong yang tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		46 %	4 Dokumen 6 Dokumen	46 %	1,333,807,500	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	46 %	500,000,000
1	0	0	2.	0	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun Panjang Saluran Drainase yang terbangun	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		46 %	6000 M 6 KM	46 %	22,835,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	46 %	3,683,300,000
1	0	0	2.	0	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		46 %	1000 M 1 KM	46 %	1,364,175,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	46 %	1,200,000,000
1	0	0	2.	0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara Panjang Saluran Drainase yang terpelihara	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		46 %	2000 M 2 KM	46 %	350,000,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	46 %	450,000,000
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								2,984,553,750				32,696,000,000
1	3	8	2. 0 1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								2,984,553,750				32,696,000,000
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Persentase Bangunan Gedung yang layak		75 %	300 Dokume 3 Dokumen	n 75 %	512,555,250	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Gedung yang layak	75 %	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
							Implementasi SIMBG Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan											
1	0 3	0 8	2. 0 1	0 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	Persentase Bangunan Gedung yang layak		75 %	2 Dokumen 7 Unit 2 Unit	75 %	2,471,998,500	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung yang layak	75 %	32,196,000,000
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							424,670,900				239,850,000		
1	3	9	2. 0 1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							424,670,900				239,850,000		
1	0 3	0 9	2. 0 1	0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan yang disusun	Persentase Bangunan Gedung yang layak		60 %	2 Dokumen 2 Dokumen	75 %	241,797,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	60 %	130,000,000
1	0 3	0 9	2. 0 1	0 5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	Jumlah Masyarakat dibina dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan Gedung yang layak		60 %	30 Orang 30 Orang	75 %	182,873,900	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	60 %	109,850,000
1	3	1 0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							103,500,000,000				210,069,000,000		
1	3	1	2.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							103,500,000,000				210,069,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
		0	1															
1	0	1	2	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/pemeli haraa jalan/jembatan yang tersusun	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	5 Dokumen 5 Dokumen	58.65 %	875,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	880,000,000
1	0	1	2	0	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan Luas Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	15000 M ² 15000 M2	58.65 %	10,000,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	0
1	0	1	2	0	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	4 Dokumen 4 Dokumen	58.65 %	2,000,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	1,500,000,000
1	0	1	2	0	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen kondisi eksisting jalan/jembatan yang tersusun	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	6 Dokumen 6 Dokumen	58.65 %	700,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	750,000,000
1	0	1	2	0	Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan yang dibangun Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	5.6 KM 5.6 KM	58.65 %	4,500,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	25,000,000,000
1	0	1	2	0	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar Panjang jalan yang dilebarkan sesuai standar	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	7 KM 7 KM	58.65 %	10,000,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	20,000,000,000
1	0	1	2	0	Rekonstruksi Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	13.5 KM 13.5 KM	58.65 %	37,925,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	45,939,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
													Umum					
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang terpelihara	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	13 KM 13 KM	58.65 %	23,100,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	40,000,000,000
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang jalan yang terpelihara	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	16.5 KM 16.5 KM	58.65 %	5,000,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	6,000,000,000
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	120 M 174 M	58.65 %	8,400,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	20,000,000,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	12 Unit 22 M	58.65 %	1,000,000,000	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	4,000,000,000
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								849,999,720			920,000,000		
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								276,676,600			380,000,000		
1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah SOP Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang ditetapkan			100 %	1 Dokumen 2 SOP		71,457,500	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	80,000,000
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi			100 %	25 Sertifikat 90 Orang		86,880,100	Dana Transf er Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
1	0	1	2.	0	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah lembaga konstruksi yang terbina Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			100 %	35 Lembaga Konstruksi 60 Orang		39,523,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	100,000,000
1	0	1	2.	0	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase Termonevnya Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan			100 %	1 Dokumen 100 %		78,816,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	100,000,000
1	3	1	2.	0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							279,921,500			260,000,000			
1	0	1	2.	0	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajem en Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota			100 %	1 Laporan 1 Dokumen		104,593,300	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	75,000,000
1	0	1	2.	0	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya SK Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota			100 %	1 Dokumen 1 SK		109,797,200	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	75,000,000
1	0	1	2.	0	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI Jumlah peserta Pelatihan Administrator SIPJAKI di Kabupaten Lima Puluh Kota			100 %	3 Orang 20 Orang		30,195,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	60,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
1	03	11	202	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggun aan Material dan Peralatan			100 %	3 Dokumen		35,336,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	50,000,000
1	3	11	204		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								293,401,620			280,000,000		
1	03	11	204	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah SOP Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang ditetapkan			100 %	1 Dokumen 2 Dokumen		99,000,620	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	50,000,000
1	03	11	204	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			100 %	20 Orang 120 Orang		72,795,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	80,000,000
1	03	11	204	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			100 %	1 Dokumen 100 %		121,606,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	150,000,000
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								1,281,179,450			1,330,000,000		
1	3	12	201		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								488,544,200			540,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
1	0	1	2.	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Persentase kemajuan proses Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			75 %	1 Dokumen 100 %		209,994,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	150,000,000
1	0	1	2.	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah RRTR yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RRTR)			75 %	1 Dokumen		99,986,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	150,000,000
1	0	1	2.	0	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan			75 %	1 Dokumen 1 Peraturan		59,095,500	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	80,000,000
1	0	1	2.	0	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Tentang Penataan Ruang			75 %	1 Dokumen 30 Orang		119,468,700	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	160,000,000
1	3	1	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								479,569,250				490,000,000	
1	0	1	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyusunan RTR Kabupaten			75 %	4 Dokumen 3 Dokumen		479,569,250	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	490,000,000
1	3	1	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								212,550,000				200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
1	0	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			75 %	24 Dokumen 5 Rekomenda	si	212,550,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	200,000,000
1	3	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							100,516,000				100,000,000		
1	0	1	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			75 %	1 Dokumen 1 Lokasi		100,516,000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	100,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							168,820,550				273,740,000		
2	1	0	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							68,829,300				173,740,000		
2	1	0	4	2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							68,829,300				173,740,000		
2	1	0	4	2	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100 %	1 Dokumen 2 Kasus		68,829,300	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	73,740,000
2	1	0	5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							99,991,250				100,000,000		
2	1	0	5	2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							99,991,250				100,000,000		
2	1	0	5	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		25 %	1 Dokumen	25 %	99,991,250			Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	25 %	100,000,000
TOTAL													171,747,227,150					351,914,704,270

BAB V

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat OPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Renstra tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tanggal 23 September 2021.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan di atas maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menyusun Rencana Kerja tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Apabila ada kegiatan dalam Renja yang tidak terakomodir nantinya dalam DPA Tahun 2023, maka kegiatan tersebut menjadi prioritas diusulkan pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan : Tabek Panjang
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									171,578,406,600				351,640,964,270
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									13,947,227,580				13,468,284,270
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									200,000,000				283,000,000
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50,000,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36,000,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,000,000
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	45,000,000
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32,000,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Laporan 4 Dokumen	78.92 Poin	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LKjIP, LKPJ yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	2 Dokumen 1 Laporan	78.92 Poin	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,000,000
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,344,045,180	8,389,884,270				
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	105 Orang 105 Orang/bulan	78.92 Poin	7,309,045,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8,334,884,270
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Dokumen 1 Laporan	78.92 Poin	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20,000,000
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	78.92 Poin	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	35,000,000
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								275,000,000	175,000,000				
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	200 Paket	78.92 Poin	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	15 Orang	78.92 Poin	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	175,000,000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								460,954,000	942,000,000				
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	15 Jenis 15 Paket	78.92 Poin	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	10 Paket 10 Unit	78.92 Poin	124,517,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	155,000,000
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	78 Jenis 100 Paket	78.92 Poin	96,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	147,000,000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang cetak yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	50000 Lembar 11 Paket	78.92 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120,000,000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	4 Jenis 3 Dokumen	78.92 Poin	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,000,000
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	20 Laporan 5875 Porsi	78.92 Poin	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	80,000,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	22 Laporan 44 OH	78.92 Poin	114,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	370,000,000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,342,923,400				119,000,000	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	4 Unit 4 Unit	78.92 Poin	488,971,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	64,000,000
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang tersedia Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Unit 1 Unit	78.92 Poin	1,781,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah mebel yang tersedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	28 Unit 14 Unit	78.92 Poin	72,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	55,000,000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,896,400,000	879,400,000				
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Laporan 1260 Lembar	78.92 Poin	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	14,400,000
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayarkan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Laporan 48 Rekening	78.92 Poin	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	130,000,000
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Laporan 48 Unit	78.92 Poin	30,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	65,000,000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan gajinya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	1 Laporan 43 Orang	78.92 Poin	1,736,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	670,000,000
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,427,905,000	2,680,000,000				
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	30 Unit 30 Unit	78.92 Poin	207,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	360,000,000
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat berat yang terpelihara Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	11 Unit 11 Unit	78.92 Poin	482,026,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,400,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	9 Unit 9 Unit	78.92 Poin	217,973,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	640,000,000
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	100 %	3 Unit 3 Paket	78.92 Poin	520,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	280,000,000
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								26,000,000,000	58,809,000,000				
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								8,800,000,000	12,085,000,000				
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	5 Dokumen 10 Dokumen	79.12 %	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	750,000,000
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	4 Unit 5 Embung	79.12 %	950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	2,500,000,000
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	18 Kawasan 0.5 KM	79.12 %	7,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	6,200,000,000
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								17,200,000,000	46,724,000,000				
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	6 Dokumen 16 Dokumen	79.12 %	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	850,000,000
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	36 Jaringan Irigasi	79.12 %	7,706,408,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	9,974,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	27 Jaringan Irigasi 9.381 KM	79.12 %	6,543,591,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	33,500,000,000
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik		84,55 %	40 Jaringan Irigasi 0.917 KM	79.12 %	2,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	84,55 %	2,400,000,000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								12,877,898,100				9,548,000,000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								12,877,898,100				9,548,000,000	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih			84,72 %	200 SR 200 Rumah		6,367,665,100			Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	84,72 %	4,100,000,000
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih			84,72 %	250 Rumah		6,510,233,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	84,72 %	5,448,000,000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								1,451,800,500				200,000,000	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								1,451,800,500				200,000,000	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			60 %	2000 Rumah Tangga 1 Unit		1,451,800,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	60 %	0
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								5,190,259,100				16,404,000,000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								5,190,259,100				16,404,000,000	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak			81,65 %	200 Rumah Tangga 150 Rumah		3,026,796,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	81,65 %	11,404,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	Luas lahan untuk IPLT		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,65 %	20000 M2		2,163,463,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	81,65 %	5,000,000,000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								3,070,817,500				5,833,300,000	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								3,070,817,500				5,833,300,000	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		46 %	4 Dokumen 6 Dokumen	46 %	1,333,807,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	46 %	500,000,000
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun Panjang Saluran Drainase yang terbangun	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		46 %	6000 M 6 KM	46 %	22,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	46 %	3,683,300,000
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		46 %	1000 M 1 KM	46 %	1,364,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	46 %	1,200,000,000
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara Panjang Saluran Drainase yang terpelihara	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		46 %	2000 M 2 KM	46 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	46 %	450,000,000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								2,984,553,750				32,696,000,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								2,984,553,750				32,696,000,000	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan	Persentase Bangunan Gedung yang layak		75 %	300 Dokumen 3 Dokumen	75 %	512,555,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung yang layak	75 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	Persentase Bangunan Gedung yang layak		75 %	2 Dokumen 7 Unit 2 Unit	75 %	2,471,998,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung yang layak	75 %	32,196,000,000
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								424,670,900	239,850,000				
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								424,670,900	239,850,000				
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan yang disusun	Persentase Bangunan Gedung yang layak		60 %	2 Dokumen 2 Dokumen	75 %	241,797,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	60 %	130,000,000
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	Jumlah Masyarakat dibina dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan Gedung yang layak		60 %	30 Orang 30 Orang	75 %	182,873,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata	60 %	109,850,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								103,500,000,000	210,069,000,000				
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								103,500,000,000	210,069,000,000				
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/pemeliharaan jalan/jembatan yang tersusun	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	5 Dokumen 5 Dokumen	58.65 %	875,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	880,000,000
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan Luas Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	15000 M² 15000 M2	58.65 %	10,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	4 dokumen 4 Dokumen	58.65 %	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	1,500,000,000
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen kondisi eksisting jalan/jembatan yang tersusun	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	6 Dokumen 6 Dokumen	58.65 %	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	750,000,000
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan yang dibangun Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	5.6 KM 5.6 KM	58.65 %	4,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	25,000,000,000
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar Panjang jalan yang dilebarkan sesuai standar	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	7 KM 7 KM	58.65 %	10,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	20,000,000,000
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang direkonstruksi	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	13.5 KM 13.5 KM	58.65 %	37,925,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	45,939,000,000
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang terpelihara	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	13 KM 13 KM	58.65 %	23,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	40,000,000,000
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang jalan yang terpelihara	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	16.5 KM 16.5 KM	58.65 %	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	6,000,000,000
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	120 M 174 M	58.65 %	8,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	20,000,000,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		58,65 %	12 Unit 22 M	58.65 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	58,65 %	4,000,000,000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								849,999,720	920,000,000				
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								276,676,600	380,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis Jumlah SOP Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang ditetapkan			100 %	1 Dokumen 2 SOP		71,457,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	80,000,000
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi			100 %	25 Sertifikat 90 Orang		86,880,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	100,000,000
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah lembaga konstruksi yang terbina Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			100 %	35 Lembaga Konstruksi 60 Orang		39,523,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	100,000,000
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase Termonevnya Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan			100 %	1 Dokumen 100 %		78,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	100,000,000
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								279,921,500	260,000,000				
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota			100 %	1 Laporan 1 Dokumen		104,593,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	75,000,000
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya SK Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lima Puluh Kota			100 %	1 Dokumen 1 SK		109,797,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI Jumlah peserta Pelatihan Administrator SIPJAKI di Kabupaten Lima Puluh Kota			100 %	3 Orang 20 Orang		30,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	60,000,000
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			100 %	3 Dokumen		35,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	50,000,000
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							293,401,620	280,000,000					
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah SOP Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang ditetapkan			100 %	1 Dokumen 2 Dokumen		99,000,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	50,000,000
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			100 %	20 Orang 120 Orang		72,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	80,000,000
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			100 %	1 Dokumen 100 %		121,606,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100 %	150,000,000
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							1,281,179,450	1,330,000,000					
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							488,544,200	540,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Persentase kemajuan proses Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			75 %	1 Dokumen 100 %		209,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	150,000,000
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah RRTR yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RRTR)			75 %	1 Dokumen		99,986,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	150,000,000
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan			75 %	1 Dokumen 1 Peraturan		59,095,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	80,000,000
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang			75 %	1 Dokumen 30 Orang		119,468,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	160,000,000
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								479,569,250				490,000,000	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyusunan RTR Kabupaten			75 %	4 Dokumen 3 Dokumen		479,569,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	490,000,000
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								212,550,000				200,000,000	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Investasi yang diterbitkan			75 %	24 Dokumen 5 Rekomendasi		212,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	200,000,000
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								100,516,000				100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah pelaksanaan penataan ruang yang terlaksana			75 %	1 Dokumen 1 Lokasi		100,516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan terhadap RTRW	75 %	100,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								168,820,550	273,740,000				
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								68,829,300	173,740,000				
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								68,829,300	173,740,000				
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi			100 %	1 Dokumen 2 Kasus		68,829,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	73,740,000
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								99,991,250	100,000,000				
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								99,991,250	100,000,000				
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		25 %	1 Dokumen	25 %	99,991,250			Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	25 %	100,000,000
TOTAL													171,747,227,150	351,914,704,270				



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :

- a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
- b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
- c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

- a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

: Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPSTP	Ketua
	Sekretaris DPMPSTP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO